



## JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN, FOKUS ASPEK LEGALITAS

# Komisi A Dukung Kondusivitas Iklim Investasi di Yogyakarta



**YOGYA (KR)** - Proyekti pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global turut menjadi perhatian kalangan legislatif di Kota Yogyakarta. Komisi A DPRD Kota Yogyakarta bahkan turut mendukung terciptanya kondusivitas iklim investasi di kota ini demi keberlangsungan pembangunan.

Meski membidangi urusan pemerintahan, namun Komisi A tetap memiliki peran yang cukup signifikan. Terutama dalam menjamin eksekutif, dalam hal ini Pemkot Yogyakarta, mampu memberikan pelayanan investasi yang terbuka, transparan, akuntabel dan nirbiaya. Hal ini pula yang mendasari alat perlengkapan dewan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan fokus pada aspek legalitas. Terutama terhadap iklim investasi industri pariwisata di bidang akomodasi atau perhotelan. Mengingat, hotel menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang cukup dominan bagi Kota Yogyakarta.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, menyebut dalam menjalankan fungsi pengawasan, salah satu yang dilakukannya ialah melakukan inspeksi ke sejumlah hotel. Seperti yang dilakukan pada Selasa (7/4) sore lalu dengan menyambangi dua lokasi di kawasan Jalan Agus Salim dan Jalan Mangkubumi (AM Sangaji). "Inspeksi yang kami lakukan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan justru melihat perkembangan izin yang sudah dilakukan. Sejauh mana prosesnya, apa yang menjadi kendala



**Komisi A DPRD Kota Yogyakarta melakukan inspeksi ke usaha perhotelan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.**

dan lain sebagainya." Dirinya bersama jajaran Anggota Komisi A pun menyakini seluruh investor mampu menaati aturan tersebut.

Justru, dengan terjun langsung mengecek aspek legalitas pihaknya bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Terutama jika pihak manajemen memiliki kendala teknis yang membutuhkan solusi tepat dan cepat. "Dulu ketika proses membangun, kami lakukan pengawasan. Kiril ketika

sudah beroperasi, kami ingin memastikan kembali. Makanya, ketika ada hambatan apapun, sampaikan ke kami. Ketika nanti butuh solusi melalui regulasi, kami tentu akan mengusulkan ke eksekutif," imbuhnya.

Dari dua lokasi usaha perhotelan yang dilakukan inspeksi kemarin, Komisi A fokus pada dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perhotelan. Dokumen SLF menjadi salah satu aspek legalitas yang cukup pen-

ting dalam menjaga keamanan dan keselamatan, baik bagi investor maupun para tamu perhotelan. Hal ini karena dalam dokumen tersebut meliputi konstruksi bangunan, fasilitas penunjang keselamatan, keamanan pekerja dan pengunjung, sanitasi serta aspek lainnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelaya-

nan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta. Kaitannya untuk membuka dokumen perizinan seluruh perhotelan yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun. "Hotel ini kan menjadi andalan PAD bagi Kota Yogyakarta. Kami ingin memastikan semuanya mampu beroperasi dengan baik, legal dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Dwi Candra Putra, menambahkan selain melakukan pengecekan administrasi, momentum ini juga digunakan sebagai ruang diskusi antara legislatif dan pelaku usaha. Pihaknya menggali informasi mengenai berbagai kesulitan atau kendala yang dihadapi investor selama mengurus proses perizinan di Kota Yogyakarta.

Hal ini menjadi krusial mengingat Kota Yogyakarta sangat mengandalkan sektor jasa dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hasil dari pengawasan dan diskusi lapangan ini nantinya akan dijadikan masukan penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan di masa depan. "Sekali lagi kami tekankan, bahwa pola penga-

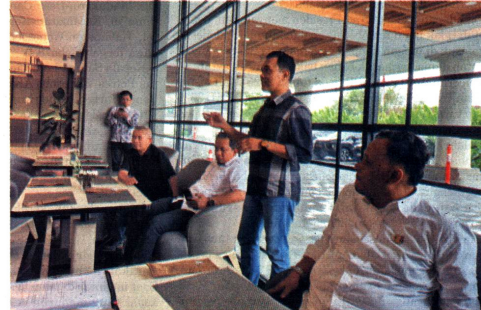
wasan ini sama sekali bukan untuk mencari-cari kesalahan. Justru kami ingin mencari formula kebijakan yang pro investasi. Bisa jadi hambatan yang dialami ternyata karena regulasi yang ambigu, tegasnya.

Menurut Candra, pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan transparan. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari kunjungan ini antara lain validasi data dengan memastikan dokumen IMB/PBG, izin lingkungan, dan izin operasional sesuai dengan pemanfaatan ruang. Kemudian juga evaluasi birokrasi dengan mengidentifikasi titik-titik penyumbatan (bottleneck) dalam proses perizinan. Muaranya ialah penyusunan formula kebijakan guna mencari solusi agar proses investasi di sektor pariwisata menjadi lebih mudah, cepat, namun tetap taat hukum.

"Tujuannya adalah menemukan formula kebijakan yang mampu memudahkan investor tanpa mengabaikan aturan. Jika investasi pariwisata tumbuh subur dan terbit administrasi, maka kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta juga akan meningkat," pungkasnya. (Dhi)



**Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mengecek kelengkapan administrasi dokumen perizinan.**



**Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mendengarkan penjelasan pihak manajemen usaha perhotelan.**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005